

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :

Radar Sampit

Halaman :

01

Kompas

Kalteng Pos

Borneo News

Palangka Post

Tabengan

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

## WTP Bukan Tujuan Akhir LKPD

### PALANGKA RAYA, PPOST

Hampir seluruh daerah berlomba-lomba mengejar target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, predikat itu bukan tujuan akhir dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

"Opini WTP bukan tujuan akhir. Tujuan akhir sebenarnya adalah tercapainya perbaikan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah. Artinya, anggaran program dan kegiatan wajib bermuara

pada kesejahteraan masyarakat," tegas Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Agus Priyono, kemarin, di Palangka Raya.

Hal itu ia sampaikan pada acara Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2021. Dalam acara tersebut, 14 pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2021 kepada BPK RI setempat. LKPD tersebut akan diperiksa selama 60 hari.

*Bersambung Ke Halaman 3*

Agus mengapresiasi kepada pemerintah daerah atas kerja keras, komitmen, dan keseriusan dalam menyelesaikan dan menyerahkan LKPD paling lambat 18 Maret 2022. Tim akan turun langsung ke setiap pemerintah daerah untuk memeriksa dan memastikan kebenaran LKPD yang telah diserahkan.

"Ini langkah awal bagi kita semua dalam menyampaikan laporan lebih cepat," kata Agus, seraya berharap LKPD tahun anggaran 2022 dapat diserahkan pal-

ing lambat akhir Februari 2023.

Bicara tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TL-RHP) oleh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan semester II tahun 2021, menurut Agus, rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti mencapai 85,58 persen.

"Angka ini berada di atas rata-rata target nasional sebesar 85 persen," bebernya.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nuryakin menyampaikan, total

APBD tahun anggaran 2021 pada masing-masing entitas pelaporan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas anggaran pendapatan sebesar Rp4,7 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 5,1 triliun lebih; dan anggaran belanja sebesar Rp4,9 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 4,5 triliun lebih.

Pendapatan dan belanja serta pengakuan akun akrual, seperti pengakuan piutang, pendapatan diterima di muka, beban dibayar

di muka, beban yang masih harus dibayar, dan ekuitas untuk masing-masing entitas pelaporan, telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca tahun 2021.

"Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabilitas. Kami juga berharap LKPD yang diserahkan memperoleh opini tertinggi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," kata Nuryakin. (mma/P2)